

DAFTAR PUSTAKA

- APBN, 2019. *Penerimaan Pajak*. <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2019/>. Diakses pada 24 Februari 2020.
- Direktur Jenderal Pajak. 2015. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-36/PJ/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-343/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya*.
- Direktur Jenderal Pajak. 2016. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Direktur Jenderal Pajak. 2017. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik Direktur Jenderal Pajak*.
- Halwani, Hendra. 2005. *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kementerian Keuangan. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*.
- Kementerian Keuangan. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.embayaran Pajak Secara Elektroni*
- Kementerian Keuangan. 2018. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 05/KM.10/2018 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan 30 Januari 2018*.
- Kementerian Keuangan. 2018. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 09/KM.10/2018 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan 27 Februari 2018*.
- Kementerian Keuangan. 2018. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 10/KM.10/2018 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas*

Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan 6 Maret 2018.

Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.*

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.*

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*

Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus.* Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak.* Edisi Ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.

Wikipedia, 2020. *Ekspatriat.* <https://id.wikipedia.org/wiki/Ekspatriat>. Diakses pada 27 Februari 2020.